

ETIKA POLITIK ARISTOTELES: Kohesivitas Etika dan Politik

Oleh:

Rahmad Tri Hadi¹, Arrasyid²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang²

rahmadtrihadi@gmail.com¹

arrasyid350@gmail.com²

Abstract

This article specifically describes and analyzes the cohesiveness between ethics and politics from Aristotle's thought. More specifically, he has written his thoughts in a book entitled Politics which has presented the concept of building the basic structure of the state and how to manage and distribute social justice (goodness). In human life, ethics and politics seem inseparable from human civilization. This is because this is one of the fundamental parts of the human paradigm and is difficult to separate. If politics is understood, as a "match"; "war"; "justify all means" will certainly give birth to politicians who are hungry for power (demoralization); who inherited animalistic traits. Instead, politics is interpreted by Aristotle in essence as "an effort to produce justice". The methods used are descriptive-analytical and historical methods with the aim of describing and analyzing the background and thoughts of Aristotle's political ethics as a whole. The results obtained first, the purpose of a country is to realize and maintain goodness. Here, it is as if Aristotle connects politics with goodness, namely ethics. Second, politics is the most important science and the most exalted thought which includes many good, and that all sciences serve it.

Keywords: *Aristoteles, Cohesiveness, Ethics, Politics*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, politik seakan tak bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu bagian yang menjadi fundamentalis dari paradigma manusia dan sulit untuk dipisahkan. Politik dalam bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara-kota. Pada masa Yunani, interaksi antar manusia bertujuan

mencapai kesejahteraan dan kebaikan. Politik merupakan alat untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan lahirnya suatu negara, bahkan kedaulatan negara. Negara merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Namun, persoalan politik juga tidak bisa lepas dari kajian etika, karena menyangkut soal moralitas di dalamnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Franz Magnis Suseno di dalam pengantar bukunya yang berjudul *Etika Politik; Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Tugas etika politik adalah subsider: membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.

Oleh sebab itu, menurut Aristoteles sendiri kehidupan negara yang ideal akan tercapai apabila tujuan negara adalah menunjang kebahagiaan masyarakat. Maka negara yang paling baik adalah negara yang organisasinya sesuai dengan fungsinya itu dan dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan-keutamaan yang diperlukan. Aristoteles sering dianggap sebagai penerus pemikiran gurunya yaitu Plato, meskipun dalam banyak hal ia tidak sependapat dengan Plato. Namun, berkat pertentangan ini, ia banyak melahirkan pemikiran filsafat baru melalui beberapa karyanya yang terkenal, salah satunya adalah *La Politika* (Politics) yang akan seterusnya mempengaruhi banyak generasi sesudahnya.

Pembahasan di atas sangatlah penting untuk dikaji serta dipahami, bagaimana tonggak-tonggak etika politik Aristoteles yang mendasari segala penelitiannya tentang syarat-syarat dan struktur-struktur organisatoris mana yang paling baik. Selanjutnya akan dijelaskan di dalam poin pembahasan.

Berbagai studi dan penelitian tentang tokoh ini sudah pernah dilakukan dari berbagai perspektif, namun masih sedikit sekali, di antaranya dari aspek *State and Civil Society* ditinjau dari etika politik Aristoteles (Namang, 2020: 247-266). Pembahasan dalam tulisan ini yakni terkait negara dan warga negara yang baik menurut Aristoteles dan bagaimana hubungan warga negara dengan negara dalam konstitusi. Dalam temuannya dalam negara terdapat elemen-elemen penting yaitu elemen identitas, partisipasi, hak, kewajiban, dan penerimaan nilai-nilai sosial bersama. Menurut Aristoteles warga negara mengambil bagian dalam kehidupan Negara. Menjadi warga negara yang baik adalah bagaimana keterlibatan warga negara yang baik dalam negara. Bagi Aristoteles Negara yang terbaik adalah kombinasi Aristokrasi dan Demokrasi. Aristoteles mengambil jalan tengah dalam pandangannya tentang Negara yang baik. Tentunya negara yang baik membutuhkan warga negara yang baik pula. Hubungan antara manusia sebagai warga negara tidak terpisahkan dari Negara. Negara membuat konstitusi untuk mengatur warganya. Konstitusi sangat penting dalam suatu Negara selama konstitusi yang dimaksud membawa keadilan

dan kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi dari masyarakat. (Namang, 2020: 247)

Secara umum penelitian-penelitian terdahulu terfokus hanya pada aspek pemikiran etika atau politik saja, namun masih kurang mendalam soal melihat kohesivitas etika dan politik itu sendiri dan kurang dalam membedah karyanya yakni *Politics*. Sedangkan tulisan ini menganalisis secara mendalam pemikiran etika politik Aristoteles, khususnya bagaimana kohesivitas etika dan politik, di samping menelaah karya primer Aristoteles sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni, pertama metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian tanpa bermaksud untuk mengambil keputusan atau kesimpulan yang berlaku umum, penyajian data akan ditampilkan secara apa adanya (Kaelan, 2005: 68). Kedua, metode histori. Metode histori dengan tujuan penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari keterangan sumber - sumber keterangan tersebut untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang, dan mengasumsikan keadaan yang akan datang (Kaelan, 2005: 61-62).

Dengan demikian, diharapkan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana latar belakang dan pemikiran etika politik Aristoteles dalam melihat kohesivitas etika dan politik secara utuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika Politik

Istilah etika politik berasal dari dua kata, “etika” dan “politik”. Istilah “etika” dalam bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos*. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*. Kata *ethos* memiliki banyak arti, yaitu: tempat tinggal yang luar biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan kata *ta etha* berarti adat kebiasaan. Kata ini kemudian mengalami transformasi sedemikian rupa hingga menjadi kata etika seperti yang kita kenal saat pada masa sekarang ini. Jadi, secara etimologis etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2013: 4-5) Aristoteles membagi filsafat menjadi dua, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Yang teoritis merefleksikan realitas yang ada, yang praktis bertanya bagaimana kita harus bertindak. Etika termasuk filsafat praktis. Baginya etika adalah ilmu tentang hidup yang baik, semakin bermutu hidup manusia, semakin bahagia (Sudjarwo, 2018: 3)

Dalam pandangan Franz Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran; yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya

melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut. Etika sekaligus kurang dan lebih ajaran moral. Kurang karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak. Lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu (Frans Magnis Suseno, 1987: 14) Jika ditarik benang merahnya, etika bias diartikan sebagai salah satu dari sistem nilai, kode etik, atau sebuah ilmu. Etika sebagai sistem nilai bercorak normatif, etika sebagai kode etik bersifat teknis dan praktis, dan etika sebagai ilmu bercorak sistematis dan ilmiah (Solissa, 2016: 5).

Sedangkan pengertian politik dalam bahasa Inggris *politic*, artinya bijaksana atau dengan bijaksana. Kata “politik” juga berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*. Kedua kata tersebut berasal dari kata, polis yang bermakna city (kota). Secara terminologi, politik merupakan keterampilan menghimpun dan menggunakannya untuk mencapai tujuan tertentu (Situmorang, 2016: 13). Dalam konteks ilmu politik terdapat dua tingkatan ilmu.

Pertama, politik yang mengkaji perumusan istilah, dalil-dalil yang membantu mendeskripsikan proses yang berlangsung, penyediaan strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan-sarana, pengamatan terhadap lembaga politik atau kuas-politik terhadap aktivitas hubungan antar manusia, klasifikasi berbagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi masing-masing.

Kedua, filsafat politik yang salah satunya mengenai etika politik. Filsafat politik bersifat metasains; tidak mengkaji realitas secara langsung, tetapi memikirkan realitas secara ilmiah oleh ilmu politik (Situmorang, 2016: 14)

Jadi, dapat dipahami bahwa etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik (Suseno, 2018: 1). Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggung jawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata.

2. Biografi Singkat Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles (384-322 SM) merupakan murid dari Plato yang paling berpengaruh. Ia berasal dari Stageira, Makedonia (kini Yunani Utara). Ayahnya seorang dokter raja setempat. Saat menginjak usia mudanya, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato selama tahun 367-347 SM (dalam versi lain hanya selama delapan tahun). Di Akademia Plato, Aristoteles mempelajari matematika, politik, etika, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Dari sekian murid Plato, Aristoteles orang yang paling sering mendebat gurunya tersebut. Dan apabila ditanya kepadanya mengapa ia senang mengecam Plato, jawabannya ialah: "Amicus Plato, sed magis amica

veritas”—”Plato kukasihi, namun aku lebih mengasihi kebenaran.” (Rapar, 2002: 139-140).

Pada 347 SM Plato meninggal, dan pada tahun yang sama Aristoteles bersama Xenokrates—teman sekolahnya di Akademia, meninggalkan Athena, kemudian ia tinggal di Mitylene. Hermeias yang menjadi penguasa di Atarneus pada masa itu menyambut kehadirannya. Ia kemudian mengajar di sekolah di sana, lalu menikah dengan Pythias, anak angkatnya Hermeias. Namun selang beberapa saat, naas pun tiba, Persia berhasil menaklukkan daerah kekuasaan Hermeias, lalu membunuh raja tersebut. Aristoteles dan isterinya lalu menyingkir dari sana dan menetap di pulau-pulau Ionia.

Setelah beberapa tahun kemudian, pada tahun 341/342 SM, Filipus, raja Macedonia mengundang Aristoteles untuk mendidik putranya, yaitu Alexander yang pada saat itu berusia tiga belas tahun, selama sekitar dua tahun. Karena Filipus dibunuh (336 SM), Alexander yang masih sangat muda terpaksa menjadi raja dan menaklukkan Persia. Setelah itu, Aristoteles dan keluarganya pergi dari istana Pella dan kembali ke Athena. Di sana ia mendirikan sekolah yang ia beri nama Lyceum, karena sekolah itu terletak di halaman kuil Apollo Lykeios. Ibid., 143. Karena cara mengajar dan tukar pikiran dengan kelompok-kelompok kecil berlangsung sambil berjalan-jalan, maka perguruannya diberi nama julukan *paripatetic*.

Aristoteles cukup berbeda dengan gurunya, Plato dalam cara

kerjanya. Meskipun, seperti Plato, ia juga mencita-citakan agar dicapainya episteme sebagai pengetahuan paling sempurna. Ia menolak adanya *idea-idea* dan pengetahuan bawaan. Baginya, setiap pengetahuan dalam bidang apapun juga baik ilmu hayat, jiwa manusia, tata negara, patokan-patokan etika maupun estetika harus dimulai dengan pengamatan (Sutrisno, 1992: 20) (Hardiman, 2012: 20). Hal inilah yang banyak melatarbelakangi karyakaryanya, serta sangat jelas bahwa Aristoteles tertarik kepada empiris dan ilmiah, dan bahwa ia tidak cenderung memperlakukan objek-objek dunia ini sebagai semi ilusi atau tak sesuai untuk menjadi objek pengetahuan itu sendiri (Copleston, 2020: 22). Beberapa tahun kemudian isterinya meninggal, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai seorang puteri yang bernama sama dengan isterinya. Kemudian, Aristoteles menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Herpyllis yang melahirkan seorang putera yang diberi nama Nikomakhos.

Pada 323 SM Alexander Agung wafat di Babylon, dan berita tersebut menimbulkan pergolakan di berbagai daerah yang ditaklukkannya, termasuk Athena. Timbullah Gerakan anti-Macedonia yang ingin membebaskan Athena dari kekuasaan Macedonia. Aristoteles pun tak luput dari imbasnya, ia dituduh sebagai pendurhaka yang menghina dewa-dewa Yunani. Ia teringat akan nasib buruk yang menimpa Socrates. Oleh sebab itu, ia melarikan diri dari Athena, lalu meninggalkan sepucuk surat. Dalam surat tersebut ia

menyatakan bahwa ia tak sudi memberi peluang bagi orang-orang Athena berbuat dosa yang kedua kalinya terhadap filsafat. Aristoteles menyerahkan Lyceum kepada Theoprastus sebelum ia melarikan diri ke Khalkis. Setahun kemudian, pada 322 SM ia jatuh sakit, dikarenakan ia terlalu memaksakan dirinya untuk bekerja tanpa mengenal batas, dan kemudian meninggal dunia di tempat pelariannya pada usia sekitar enam puluh dua tahun (Rapar, 2002: 144).

3. Review Singkat Politika (Politics) Karya Aristoteles

Mengenai karya tulis Aristoteles, menurut para cendekiawan di zaman purba, ada lebih dari empat ratus buku yang dianggap buah jerih lelahnya, namun sebagian besar telah hilang. Dari sekitar lima puluh buku yang masih ada, hanya sekitar separuhnya yang benar-benar hasil karya Aristoteles sendiri. Buku Politika yang ditulis Aristoteles di mulai pada saat di Akademia Plato. Ia meletakkan dasar yang teguh bagi cabang ilmu politik yang disebut: Perbandingan pemerintahan dan politik (Rapar, 2002: 146)

Apabila *The Republic* Plato begitu terkenal dari abad ke abad dan diakui dunia sebagai hasil seni sastra yang paling agung dan merupakan karya manusia yang terbesar yang pernah ditulis di bidang filsafat, serta senantiasa sanggup memberi inspirasi baru bagi pemikiran-pemikiran politik hingga saat ini, maka kendatipun Politika (Aristoteles, 1995: xxxii). Aristoteles tidak sanggup menyaingi ketenaran *The*

Republic Plato itu, namun sesungguhnya, Aristoteles berhasil melengkapi beberapa kelemahan pemikiran yang dikembangkan oleh Plato, bahkan ia sanggup melanjutkan dan menyempurnakan langkah yang telah diayunkan oleh Plato menjelang akhir hayatnya, yakni langkah-langkah yang menuju ke realisme.

Bentuk dan susunan Politika telah mengundang bermacam teori sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan bagi setiap pembaca yang benar-benar berminat untuk memahami karya tulis tersebut. Sebab, Politika merupakan karya otentik yang ditulis dalam dua masa dengan latar belakang pemikiran yang sangat berbeda satu sama lainnya. Meski banyak menimbulkan dinamika dan skeptis yang besar di kalangan para ahli dan pembaca yang serius terkait penyusunan karya tersebut, usaha untuk merapikan karya tersebut terus berjalan dengan berbagai macam teori yang disodorkan oleh para ahli hingga tersusun sedemikian rupa. W.D. Ross, lalu dilanjutkan oleh Ernest Barker yang cukup arif dengan menganjurkan agar pembaca mengikuti dan menerima saja susunan dan urutan Politika itu sebagaimana adanya. Dan memang pada umumnya para pembaca Politika di masa kini telah menerima karya tulis Aristoteles itu sebagaimana adanya sesuai susunan dan urutan yang telah dikenal secara tradisional. (Rapar, 2002: 163-164).

Mengenai susunan, urutan dan isi Politika (Aristoteles, 1995: 3-5). itu adalah sebagai berikut:

Buku I :Menguraikan tentang asal mula negara, keluarga, dan desa. Juga menguraikan soal budak dan ekonomi keluarga.

Buku II :Perkenalan dengan negara ideal atau negara idaman.

Buku III :Memaparkan tentang siapa warga negara ideal, pembagian kekuasaan politik yang adil dan benar, mengenai keadilan dan kedaulatan serta keadilan dan persamaan derajat dan ditutup dengan uraian tentang raja ideal.

Buku IV :Merupakan catatan tentang hasil penelitian mengenai jenis-jenis konstitusi.

Buku V : Memaparkan tentang sumber-sumber perubahan konstitusi (revolusi) dan analisa dari sebab-sebab ketidakstabilan negara.

Buku VI :Menguraikan tentang cara-cara memelihara kestabilan negara.

Buku VII :Konstruksi negara ideal dan mengenai pendidikan dalam negara idaman tersebut.

4. Beberapa Pemikiran Etika Politik Aristoteles:

a. Kohesivitas antara Etika dan Politik

Aristoteles mengaitkan politik dengan etika. Dalam bukunya, *Nicomachean Ethich*, ia menegaskan bahwa kebaikan berkaitan dengan perseorangan dan negara. (Aristoteles, 2009: 62). Jelas pula bahwa pencapaian negara yang baik

adalah sesuatu yang paling agung dan sempurna. Dapat disimpulkan bahwa politik, menurut Aristoteles adalah sisi sosial unsur etika, yaitu etika secara luas yang meliputi semua ilmu terapan etika, termasuk etika—dengan arti yang lebih sempit—terhadap tanah air, negara, dan apapun yang berhubungan dengan pendidikan, pengaderan, dan ekonomi.

Aristoteles pada sebagian besar bukunya terutama pada akhir bukunya Aristoteles yaitu *Nicomachean Ethich* dan bagian awal bukunya, *Politika*, memberi isyarat terhadap kohesivitas antara etika dan politik. Bahkan dalam bukunya, *Politika*, kita menemukan ia membuka pembahasan dengan ungkapan, “Semua negara secara aksiomatik adalah sebuah perkumpulan. Setiap perkumpulan dibentuk untuk menghasilkan kebaikan. Manusia—di mana pun berada—pasti mengejar sesuatu yang tampak baik baginya.”Aristoteles, *Politics*, buku pertama, bab pertama, poin ke-1.

Kita dapat menarik dua kesimpulan dari ungkapan Aristoteles di atas, Pertama, tujuan sebuah negara adalah mewujudkan dan memelihara kebaikan. Di sini, seolah-olah Aristoteles menghubungkan politik dengan kebaikan, yakni etika. Kedua, politik adalah ilmu paling penting dan pemikiran paling agung yang meliputi banyak kebaikan, dan bahwasanya semua ilmu melayaninya.

Setelah itu, Aristoteles mulai menjelaskan tata cara mendirikan

negara yang dimulai dari keluarga. Ia mengatakan bahwa ada dua macam keluarga yang pertama kali terbentuk, yaitu antara tuan dan budaknya, serta antara suami dan istri. Inilah dua kaidah keluarga sebagai pembentuk kelompok (Aristoteles, 1995). Desa dibentuk dari beberapa keluarga ini. Kumpulan desa inilah yang membentuk negara. Negara lahir karena kebutuhan hidup dan terus bertahan untuk pemenuhan semua kebutuhan itu. Negara muncul karena, secara naluri, manusia adalah makhluk bermasyarakat (zoon politikon). Jika ada yang bertahan hidup sendirian dan mengasingkan diri, mungkin ia hewan atau tuhan (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 11).

Negara tentunya lebih tinggi daripada individu, keluarga, dan desa. Sebab, setiap sesuatu pasti lebih tinggi daripada bagian-bagiannya. Bagian-bagian itu tidak akan ada jika sesuatu itu rusak. Menurut Aristoteles, tidak perlu diragukan lagi bahwa negara berada di atas bagian-bagiannya. Ketika sesuatu itu rusak, bagian-bagian itu sudah tidak ada lagi. Tangan ketika berpisah dari badan, pada hakikatnya bukanlah tangan (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 6)

Benar, asas sebuah negara adalah kemestian hidup berkelompok. Namun, tujuan negara lebih dari sekedar melestarikan hidup. Tujuannya adalah mewujudkan penghidupan yang baik, kehidupan yang mulia, dan menghiasi rakyat dengan keutamaan dan keadilan. Keadilan adalah kebutuhan sosial karena kebenaran adalah dasar sebuah perkumpulan politis.

Keputusan orang yang adil adalah yang mewujudkan keadilan.

Keluarga adalah sel pertama dalam struktur tubuh sebuah masyarakat. Bahkan, keluarga adalah masyarakat yang pertama. Keluarga tidak hanya hanya dalam konotasi segitiga berupa suami, istri, dan anak. Aristoteles menginginkan makna keluarga yang lebih luas. Menurutnya, keluarga mencakup famili, kerabat, anak, dan budak. Pimpinan keluarga tersebut bisa dipegang oleh suami, atau ayah, atau tuan bagi budak. Lelaki bagi Aristoteles, adalah—di luar beberapa pengecualian—yang memimpin perempuan. Ini sama halnya bahwa sesuatu yang lebih besar dan sempurna memimpin sesuatu yang paling kecil dan paling kurang (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 1).

Berbeda dengan pandangan Aristoteles di atas, Plato mendengungkan persamaan antara perempuan dan laki-laki sampai dalam urusan politik dan militer. Adapun sebab perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tuan dan budak, orang tua dan anak, dan sebagainya kembali pada kenyataan bahwa manusia, sejak kelahirannya, sebagiannya dikhususkan untuk taat, sedangkan sebagian lain untuk memimpin (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 8)

Bagi Aristoteles, alam ditundukkan untuk manusia. Konsekuensinya, manusia berhak mengambilnya melalui pertanian dan perburuan. Oleh karena itu, perang bagaimanapun bentuknya merupakan sarana untuk memanfaatkan alam.

Dengan demikian, perang merupakan legitimasi bagi pengambilan hak kepemilikan terhadap alam sendiri (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 8)

b. Kritikan Aristoteles terhadap Teori Politik Plato

Plato berpendapat bahwa keburukan dan konflik ada seiring dengan dibangunnya keluarga dan kepemilikan. Oleh karena itu, ia mendengarkan gagasan kepemilikan bersama terhadap perempuan dan harta. Namun, Aristoteles tidak sepakat dengan Plato dalam masalah ini. Bahkan, ia menjelaskan bahwa gurunya telah melupakan aspek kepedulian terhadap permasalahan anak-anak. Ia hanya menjadikan anak sebagai objek, dan melupakan aspek kasih sayang yang dibutuhkan anak. Dalam diri manusia terdapat dua motif besar untuk memperoleh belas kasih, yaitu memiliki dan mencintai. Namun, kedua motif ini tidak mendapat tempat dalam pandangan Politik Plato (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 17)

Demikian pula, Aristoteles mengkritik pemikiran Plato tentang kepemilikan bersama terhadap harta dan hasrat memiliki. Kepemilikan bersama terhadap harta mengimplikasikan kepemilikan terhadap harta itu. Walaupun hal itu bermanfaat dalam meredam konflik-konflik internal dalam negara, pada kenyataannya, hal itu justru menimbulkan keburukan dan berujung pada pemberontakan. Setiap orang nantinya akan mengklaim bagian kepemilikan yang lebih besar terhadap harta tersebut dibandingkan

orang lain. (Muhammad, 2010: 44) Aristoteles berpendapat bahwa yang paling baik dilakukan adalah menemukan pangkal kesenjangan ekonomi di antara rakyat. Sebagai ganti dari penyamaan kesejahteraan kepada rakyat, negara wajib mengelola kekayaan negara dengan baik (Aristoteles, 1995: Bab IV, Poin 12).

Plato menegaskan bahwa hendaknya kendali pemerintahan berada di tangan orang paling pintar dan bijaksana, alias filsuf yang lebih ia rekomendasikan. Ia tidak meragukan lagi bahwa aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang utama, yang sedikit, dan yang bijaksana. Namun Aristoteles tidak sepakat dengan pendapat Plato dalam persoalan ini. Ia berpendapat bahwa para pemimpin aristokrasi berlindung di balik kepentingan pribadinya, sebagaimana yang terjadi pada seorang raja. Konsekuensinya adalah apabila kepentingan pribadinya bertentangan dengan kepentingan publik, mereka akan lebih mendahulukan kepentingan pribadinya. Dan ujung akhir dari pemerintahan aristokrasi adalah pemerintahan oligarki, yakni pemerintahan yang dikendalikan oleh minoritas dari kalangan elite (Aristoteles, 1995: Bab II, Poin 5) *Macam-macam Bentuk Pemerintahan*

Bagi Aristoteles, pemerintahan yang benar adalah pemerintahan yang dapat menegakkan supremasi hukum. Dengan supremasi inilah akal, memimpin tanpa disimpangkan oleh perasaan atau keinginan tertentu. Berikut pemerintahan yang benar menurut Aristoteles, yaitu:

Pertama : Monarki, pemerintahan yang dipimpin seseorang yang utamadan adil;

Kedua : Aristokrasi, pemerintahan yang dipimpin oleh minoritas yang utama dan adil;

Ketiga : Demokrasi, pemerintahan berdasarkan keinginan mayoritas rakyat.

Keistimewaannya adalah adanya kebebasan (Aristoteles, 1995: Bab IV, Poin 7)

Adapun pemerintahan yang rusak juga terdiri dari tiga bentuk:

Pertama : Tirani (despotisme), pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang lalim;

Kedua : Oligarki, pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang elite, atau minoritas yang terdiri atas orang-orang kaya;

Ketiga: Demagogi, pemerintahan publik yang mengikuti hawa nafsu para pemimpin, dinamai pula dengan pemerintahan pemberontak.

Keempat : Menurut Aristoteles, undang-undang yang paling baik adalah yang menjadikan semua elemen negara sebagai warga negara. Demokrasi menurutnya adalah pemerintahan yang paling baik. Sebab, mayoritas dengan asumsi bahwa tiap-tiap anggotanya secara individual tidak memiliki kecerdasan, namun memiliki kecerdasan secara kolektif. Pemerintahan demokrasi adalah republik yang utama dan berlandaskan prinsip etika politik,

yakni prinsip moderat dalam segala hal, sekiranya moderasi dalam harta, penghargaan, dan kebebasan tumbuh dari prinsip ini. Pemerintahan yang ideal dan moderat bagi Aristoteles, harus bersandar pada kelas menengah, yakni mereka yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Ini akan menghindarkan oligarki yang menyudutkan orang-orang miskin, atau tirani yang dipimpin individu yang lalim (Muhammad, 2010: 49)

Selain itu, jika melihat inti catatan Aristoteles tentang dominasi tirani adalah bagaimana para tiran memupuk sifat buruk etis "berjiwa kecil", sehingga menghasilkan subjek dengan keinginan rendah hati untuk distribusi kekuatan politik yang proporsional

Pada perkembangan politik di era modern misalnya, salah satu filsuf abad modern yang terpengaruh oleh pemikiran politik Aristoteles ini yakni Thomas Hobbes. Ia berupaya mengeksplorasi gagasan bahwa paradigma negara sebenarnya dapat ditemukan dalam bacaan modern awal yakni pemikiran Aristoteles tentang demokrasi. Hobbes berpendapat bahwa pada akhir abad ke-16, meditasi pada tubuh politik demokratis ini telah mengembangkan klaim tentang kesatuan, mitologi, dan kepribadian yang akan menjadi pusat teorinya sendiri tentang persemakmuran suatu negara (Smith, 2018: 167-196)

Negara: Unsur-unsur Vital dan Posisi Wilayahnya

Pertama: Unsur-unsur vital dalam pembentukan sebuah Negara

Menurut Aristoteles, unsur-unsur vital yang harus dimiliki sebuah negara adalah:

(a) Terpenuhinya logistik, (b) terpenuhinya sarana-sarana penyelenggaraan pemerintahan, (c) tersedianya sistem persenjataan dan perlengkapan peran yang harus diperbaharui, untuk mengawal undang-undang dan menangkis serangan musuh dari luar, (d) tersedianya cadangan logistik yang bisa dimanfaatkan sewaktu dalam keadaan genting dan perang, (e) terpenuhinya unsur-unsur religius yang ditangani langsung oleh agamawan untuk merekatkan kasih sayang di antara warga negara.

Aristoteles mengatakan bahwa unsur-unsur di atas wajib dimiliki sebuah negara di mana pun berada. Negara bukanlah sebuah perkumpulan yang diikat oleh sekedar kesepakatan. Negara adalah perkumpulan manusia yang mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Negara menuntut profesi yang berbeda-beda dari rakyatnya. Dengan demikian, harus ada orang bertani untuk memenuhi kebutuhan makan rakyat. Harus ada kalangan buruh, tentara-tentara, orang-orang kaya, para agamawan, dan para hakim untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Aristoteles, *Politics*, keempat, bab tujuh, poin ke-5.

Kedua: Posisi Wilayah Negara (Teritorial)

Wilayah negara harus berada dalam posisi yang memungkinkan rakyat hidup dengan sehat. Infrastruktur negara memungkinkan rakyat dapat menjalankan urusan-urusan dalam negeri dan luar negeri dengan mudah. Agar hal-hal di atas terpenuhi, maka harus bisa memilih wilayah yang strategis untuk ditempati.

Negara harus memastikan ketersediaan banyak air dan tersedianya sumber-sumber mata air. Jika tidak ada, negara harus memiliki sistem irigasi yang luas untuk menampung air hujan, sehingga tersedianya pasokan air, jika terputus karena kondisi perang. Wilayah negara harus memperhatikan sistem keamanan yang memadai. Meski demikian, Aristoteles tidak berpendapat bahwa negara harus luas. Berdasarkan fakta, sulit bahkan mustahil mengelola negara dengan baik jika penghuninya melebihi batas kewajaran (Aristoteles, 1995: Bab I, Poin 8). Dengan demikian, luas negara harus sesuai dengan jumlah penduduk.

c. Trias Politica sebagai Alternatif Kebaikan Sosial

Di sini, dalam pemikiran Aristoteles—seorang pemikir yang mendalam, kita menemukan konsep tiga pembagian kekuasaan itu. Kita temukan fakta pula bahwa konsep itu melekat dengan pengalaman politik Yunani yang—tanpa perlu diragukan lagi—memiliki setting yang berbeda dengan politik zaman modern dan kontemporer sekarang.

Jika suatu negara dikelola dengan baik dengan tujuan mencapai kebaikan bersama, menurut Aristoteles, maka alternatifnya adalah dengan membagi kekuasaan menjadi tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, atau permusyawaratan rakyat adalah kekuasaan yang menangani urusan undang-undang, menetapkan perjanjian, dan mengawasi kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif memungkinkan untuk memilih pemimpin negara, menyetujui peraturan pemerintah, dan menetapkan keadaan damai atau perang.

Menurut Aristoteles, jumlah pemegang kekuasaan eksekutif disesuaikan dengan luas wilayah negara. Pada negara yang besar dimungkinkan-bahkan harus—bila suatu jabatan yang terpisah diadakan untuk jenis tertentu. Dalam negara kecil, sebaliknya sejumlah besar fungsi harus dilakukan oleh hanya beberapa orang (Aristoteles. 1995: Bab XII, Poin 4-5). Supaya kekuasaan eksekutif dapat direalisasikan, maka ada tiga unsur yang harus dipenuhi. Pertama, pemilih. Kedua, yang dipilih. Ketiga, mekanisme pemilihan.

Kekuasaan yudikatif (pengadilan), menurut Aristoteles, yakni kekuasaan yang berkaitan dengan mahkamah, akan berbeda-beda seiring dengan jumlah pejabat yang tersedia, sebagaimana halnya berbeda-beda seiring dengan perbedaan perkara yang ditangani setiap pengadilan (Aristoteles, 1995: Bab XIII, Poin 1-2).

d. Teori Umum Revolusi

Aristoteles berpendapat bahwa semua aliran politik, dengan perbedaannya masing-masing, mengakui hak-hak individu mengenai persamaan. Akan tetapi, dalam tataran aplikasinya, tiap aliran politik berbeda-beda. Kadang-kadang pula, yang menjadi objek penyerangan adalah prinsip yang dianut pemerintahan itu sendiri, baik itu demokrasi, aristokrasi, atau oligarki. Tujuan revolusi ini adalah mengubah ideologi negara, yang tentu saja berimbas pada perubahan undang-undang. Kadang-kadang pula, yang menjadi revolusi adalah merebut kekuasaan tanpa harus mengubah undang-undang. Inilah yang marak terjadi pada pemerintahan oligarki dan monarki.

Namun, terkadang revolusi bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan dasar-dasar ideologi pemerintah. Terkadang pula, revolusi menginginkan perubahan sebagian unsur undang-undang, seperti memunculkan job jabatan atau meniadakannya, atau seperti membuat produk undang-undang atau membatalkannya. Aristoteles kembali menegaskan bahwa ketidakadaan persamaan merupakan sebab hakiki dan pertama bagi munculnya revolusi. Ketidakadaan persamaan ini lebih banyak terjadi pada pemerintahan oligarki. Peluang revolusi terhadap pemerintahan demokrasi lebih kecil daripada terhadap pemerintahan oligarki.

Kemudian Aristoteles menjelaskan motif-motif revolusi. Ia melihat ada kepentingan-kepentingan

pribadi yang melatarbelakanginya. Jika seseorang berada di posisi yang rendah, ia akan memberontak supaya dapat merebut kekuasaan. Selain itu, motif-motif lainnya serta pengaruh-pengaruh tertentu, yang di antaranya adalah keserakahan dalam harta dan gelar, keterhinaan, rasa takut, superioritas-imperioritas, dan kesenjangan. Aristoteles kemudian menegaskan bahwa pada sebagian negara, revolusi muncul karena konspirasi politik, atau karena dikesampingkan pemerintah, atau konflik-konflik lainnya yang ada di lokasi negara berada, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok, hal tersebut merupakan ancaman bagi keutuhan negara (Aristoteles, 1995: Bab III, Poin 7).

Aristoteles selanjutnya memberikan beberapa saran untuk menjaga kedaulatan negara agar tidak terjadi revolusi:

- 1) Senantiasa memelihara dan menaati undang-undang.
- 2) Menjalin komunikasi yang baik antara pemimpin dan pendukung politiknya dan seluruh rakyat.
- 3) Memberikan batasan waktu tertentu bagi jabatan-jabatan politik.
- 4) Menyelesaikan segala bentuk pertengkaran dan permusuhan.
- 5) Menerapkan manajemen yang baik dalam distribusi kesejahteraan rakyat.
- 6) Menerapkan secara hukum segala bentuk kesewenang-wenangan terhadap rakyat.
- 7) Pembagian kekuasaan yang baik terhadap rakyat, terutama yang memiliki kecakapan.
- 8) Memberikan perhatian yang baik terhadap orang-orang miskin dan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada mereka, serta

- memberikan sanksi kepada orang-orang kaya yang bertindak semena-mena kepada orang-orang miskin.
- 9) Memilih pemimpin yang utama, adil, dan bertindak moderat.
- 10) Menyelaraskan pendidikan dengan prinsip undang-undang.

Aristoteles menjelaskan bahwa undang-undang yang paling bermanfaat adalah yang dibentuk atas dasar kesepakatan rakyat. Undang-undang menjadi sia-sia apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip politik (Aristoteles, 1995: Bab VII, Poin 2).

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam perkembangan pemikiran politik awal Yunani dibagi menjadi dua pendekatan. Pertama, pendekatan rasional, yakni hasil pemikiran seseorang berdasarkan prinsip-prinsip rasional untuk mengkritisi peristiwa-peristiwa politik. Kedua, pendekatan sejarah, yakni yang bersumberkan kejadian-kejadian sejarah itu sendiri. Pendekatan pertama berhubungan dengan etika dan filsafat, sedangkan pendekatan kedua berhubungan dengan etika dan filsafat. Demikian pemikiran etika politik Aristoteles. Kalau pemikiran politik Plato dengan pendekatan rasional, sebaliknya, pemikiran politik Aristoteles mengalir dari kejadian-kejadian sejarah dan fenomena-fenomena sosial. Aristoteles berpendapat bahwa pembentukan negara harus dilandasi struktur yang bagus. Ia cenderung menganalisis unsur-unsur negara dan bagaimana disusun dan diatur sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Namun, di samping bersandar

pada pendekatan sejarah, ia pun bersandar pada pendekatan rasional sebagai pisau analisisnya. Dengan begitu, dapat kita tarik dua kesimpulan dari ungkapan Aristoteles di pembahasan di atas. Pertama, tujuan sebuah negara adalah mewujudkan dan memelihara

kebaikan. Di sini, seolah-olah Aristoteles menghubungkan politik dengan kebaikan, yakni etika. Kedua, politik adalah ilmu paling penting dan pemikiran paling agung yang meliputi banyak kebaikan, dan bahwasanya semua ilmu melayaninya.

Daftar Kepustakaan

- Aristoteles. 1995. *Politics*. (E. Barker, Ed.). New York: Oxford World's Classics.
- . 2009. *The Nicomachean Ethics*. (D. Ross, Ed.). New York: Oxford World's Classics.
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia.
- Copleston, F. 2020. *Filsafat Aristoteles*. (Ama Achmad, Ed.). Yogyakarta: Basabasi.
- Frans Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, Budi. 2012. *Humanisme dan Sesudahnya*. Jakarta: Prima Graika.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*. Yogyakarta: Paradigma.
- Muhammad, A. A. M. 2010. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. (M.A. Djaliel, Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Namang, R. B. 2020. "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2).
- Rapar, J. H. 2002. *Filsafat Politik; Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Situmorang, J. 2016. *Etika Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Smith, S. 2018. "Democracy and the Body Politic from Aristotle to Hobbes". *Political Theory* 46(2).
- Sudjarwo. 2018. *Filsafat Etika*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suseno, F. M. 2018. *Etika Politik; Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sutrisno, F. M. 1992. *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Yogyakarta: Kanisius.